

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Kedaulatan Rakyat

Wilayah: Kabupaten Banjarnegara

Halaman 17

KUA dan PPAS Perubahan APBD Disepakati



BANJARNEGARA (KR)

Fraksi-fraksi di DPRD Banjarnegara menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2019 menjadi Nota Kesepakatan DPRD dengan Pemkab Banjarnegara.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditanda-tangani bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dengan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna Dewan, Kamis (25/7). Sebe-

lumnya, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Banjarnegara Nuryanto didampingi juga wakilnya itu, fraksi-fraksi secara bergantian menyampaikan pendapat terhadap rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2019.

APBD perubahan Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2019 direncanakan naik 1,87 persen atau Rp 38,9 miliar dari APBD murni 2019 dari sebelumnya Rp 2,083 triliun menjadi Rp 2,122 triliun. Kebijakan perubahan APBD tahun 2019 merupakan rasionalisasi target pembangunan. Kenaikan didapat dari peningkatan PAD sebesar Rp 13,71 miliar dari sebelumnya Rp 231,8 miliar menjadi Rp 245,53 miliar. Selain itu, kenaikan juga didapat dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melalui juru bicara Supoyo Raharjo mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan tetap harus diprioritaskan tanpa mengesampingkan

sektor pertanian, pertanian dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian.

Pada bagian lain, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar eksekutif memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) untuk bidang sosial. "Arahkan untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, sekolah gratis dan pengobatan gratis bagi warga tidak mampu serta anak yatim piatu," kata Supoyo Raharjo.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Isnan Ahmad Riyadi, mengatakan, fraksinya sepakat dan sependapat penyusunan KUA APBD Perubahan tahun 2019 diarahkan untuk mengakselerasi pencapaian visi Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera dengan target 4 indikator makro sebagaimana dilaporkan Badan Anggaran.

Target indikator makro meliputi pertumbuhan ekonomi diusahakan tumbuh 5,67 persen, laju inflasi ditekan hingga dibawah 3



KR-Muchtar M

Pimpinan DPRD dan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menandatangani berita acara dan nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2019 menjadi Nota Kesepakatan DPRD dengan Pemkab Banjarnegara.

persen, angka kemiskinan diturunkan dari 15,41 persen dan tingkat pengangguran diupayakan turun hingga dibawah 4 persen.

Sehubungan dengan itu, Fraksi PAN usul agar sektor primer khususnya pertanian, perikanan dan kehutanan diberi ruang fiskal dalam APBD Perubahan. Demikian pula sektor sekunder khususnya industri pengolahan dan

sektor tersier terutama perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil maupun sepeda motor.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengatakan, semua masukan dan saran fraksi akan dijadikan sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ke depan. (Mad)-c